

# KEAMANAN SURAT UTANG NEGARA YANG DIJUAL SECARA LELANG DITINJAU DARI ASAS AKUNTABILITAS

Slamet Arifin, Habib Adjie

Fakultas Hukum Universitas Gresik, Jl. Arif Rahman Hakim No. 2B, Gresik  
Email: slametarifin691@gmail.com

## ABSTRACT

The government auctioned seven series of Government Securities on March 29, 2022, the auction was conducted so that the government would obtain funds to finance the 2022 State Budget, by conducting an auction of Government Securities for the SPN03220629 (new issuance), SPN 12230330 (new issuance), FR0090 (reopening) series. FR0089 (reopening). The purpose of a person participating in the auction of Sovereign Debt Instruments is to invest, considering that Government Securities are included in bonds, which is one of the products traded in the capital market as an investment scope. Sovereign Debt Instruments are securities in the form of debt acknowledgments that are guaranteed payment of interest and principal by the Republic of Indonesia according to their validity period, so everything in the object of Government Securities must be accountable by the government, both from the legal aspect and from the economic aspect.

The research method of this writing uses normative juridical research methods. The approach used in this study uses an analytical descriptive analysis method regarding the security of Government Securities sold at auction in terms of the principle of accountability. The technique of collecting legal materials is carried out through library research and analysis of library materials, as well as internet browsing studies including articles and scientific journals related to this research. After the legal materials have been collected, they are then analyzed using descriptive analytical and critical techniques.

The Government Securities Auction is conducted using an auction system organized by Bank Indonesia, which is open (open auction), using the multi-price method. Auction winners who submit non-competitive bids will pay according to the weighted average yield of the winning competitive bids. In the application of the principle of accountability, the government must provide certainty and security guarantees for the object of the auction of Government Securities, both juridically and economically. Bearing in mind that Government Securities are part of assets, in which assets there are potential risks in them, which can potentially harm and/or benefit the parties who control the object.

**Keywords:** *Accountability; Auction; Government Bonds;*

## 1. Pendahuluan

Dasar hukum lelang pertama kali diundangkan di Indonesia pada tahun 1908 dengan diberlakukannya Peraturan Lelang atau dikenal dengan *Vendu Reglement*, yang mana hanya berlaku bagi warga Belanda kala itu menduduki Hindia Belanda (Indonesia). Melalui *Vendu Reglement*, kala itu mengatasi permasalahan barang milik para pejabat Belanda yang dijual secara lelang. *Vendu Reglement* di dalamnya mengatur tata cara lelang, siapa pihak-pihak yang melaksanakan lelang, obyek lelang, biaya-biaya yang timbul dalam lelang dan lain sebagainya. Hingga setelah Indonesia merdeka, mekanisme terkait lelang telah mengalami perubahan, terutama pada aspek yuridisnya. Dewasa ini, Kementerian Keuangan berwenang dalam proses pelaksanaan lelang, yang menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berkaitan dengan obyek lelang, Surat Utang Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI). Surat

utang negara merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. Surat Utang Negara digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah seperti untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>1</sup>

Terkait lelang Surat Utang Negara, pemerintah kembali melelang 7 (tujuh) seri Surat Utang Negara pada tanggal 29 Maret 2022, lelang dilakukan agar pemerintah mendapatkan dana untuk membiayai APBN 2022. Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara untuk seri SPN03220629 (*new issuance*), SPN 12230330 (*new issuance*), FR0090 (*reopening*), FR0089 (*reopening*).<sup>2</sup> Dari lelang 7 seri SUN tersebut, pemerintah hanya mengantongi Rp 17 triliun, dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp 41,6 triliun. Penjualan SUN tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (*open auction*), menggunakan metode harga beragam (*multiple price*).<sup>3</sup>

Pada dasarnya, Surat Utang Negara dapat dijual di luar mekanisme lelang, yakni dapat dijualbelikan melalui mekanisme pasar modal. Mengingat bahwa di dalam pasar modal sendiri, memiliki berbagai macam instrumen yang diperjualbelikan, salah satunya yaitu obligasi atau Surat Utang Negara. Adapun tujuan seseorang berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang Surat Utang Negara adalah untuk semata-mata berinvestasi, mengingat bahwa Surat Utang Negara termasuk obligasi, yakni salah satu produk yang dijualbelikan dalam pasar modal sebagai lingkup investasi.

Data DJPPR juga menunjukkan jumlah penawaran asing yang masuk pada lelang SUN tahun 2022 selalu di bawah Rp 10 triliun. Pengecualian terjadi pada 12 Januari 2022 di mana jumlah penawaran dari investor asing mencapai Rp 12,37 triliun. Sepanjang periode Maret hingga awal Mei, penawaran yang masuk dari investor asing bahkan selalu di bawah Rp 5 triliun. Penawaran yang masuk pada lelang, terutama dari investor asing, selalu turun setelah pengumuman kenaikan suku bunga acuan The Fed. Pada lelang 15 Maret dan 10 Mei atau setelah pengumuman kenaikan The Fed, penawaran yang masuk pada lelang juga tergolong rendah. Dari penawaran asing yang masuk, pemerintah hanya mengambil Rp 1,99 triliun. Jumlah tersebut adalah yang terendah dalam tiga lelang terakhir. Pemerintah bahkan hanya mengambil penawaran dari tiga seri yakni FR090, FR091, dan FR092 sementara penawaran dari seri FR0093 sebesar Rp 210 miliar tidak diambil.<sup>4</sup>

Obligasi merupakan sebuah produk investasi yang dapat ditemukan di pasar modal. Obligasi berupa surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak terkait, biasanya datang dari pemerintah atau korporasi, namun bisa juga diterbitkan oleh perseorangan. Di dalam obligasi yang diterbitkan,

---

<sup>1</sup> Investasi, Surat Utang Negara, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/67>, diakses 11 Agustus 2022.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dikutip Yoga Sukmana, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2022/03/29/161352726/lelang-surat-utang-negara-pemerintah-hanya-kantongi-rp-17-triliun>, diakses 11 Agustus 2022.

<sup>3</sup> Yoga Sukmana, *Ibid*.

<sup>4</sup> Maesaroh, Terbatas, Minat Asing di Lelang Surat Utang Negara RI, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220621150032-17-348973/terbatas-minat-asing-di-lelang-surat-utang-negara-ri>, diakses 14 Agustus 2022.

biasanya tercantum pernyataan bahwa setiap pembeliannya memiliki bunga yang akan berkembang dan memberi keuntungan bagi pemiliknya dalam jangka waktu tertentu. Obligasi sebagai produk investasi terbaik ini juga bisa diaplikasikan untuk jenis investasi jangka panjang ataupun jangka pendek, karena biasanya memiliki waktu jatuh tempo mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun.<sup>5</sup> Dari potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh calon investor, maka tidak heran jika Surat Utang Negara atau obligasi banyak peminatnya. Apalagi produk tersebut dijual secara lelang, maka persaingan dalam memperoleh produk tersebut menjadi lebih kompetitif.

Berkaitan dengan mekanisme penjualan Surat Utang Negara, hal ini dapat ditemukan dalam konsideran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 Tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana, tepatnya pada bagian Menimbang poin (a) yaitu “bahwa dalam rangka pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan dapat melakukan penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.

Dalam konteks lelang dikenal adanya asas akuntabilitas, yang mana dalam asas akuntabilitas harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu obyek yang dijualbelikan secara lelang. Mengingat bahwa secara definisi Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya,<sup>6</sup> maka segala yang ada dalam obyek Surat Utang Negara harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, baik dari aspek hukumnya maupun aspek ekonomis.

Metode penelitian dalam penulisan ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan dengan metode analisis deskriptif analitis tentang keamanan Surat Utang Negara yang dijual secara lelang ditinjau dari asas akuntabilitas.

Oleh karena itu, dari uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah “Bagaimana kewananan Surat Utang Negara yang dijual secara lelang ditinjau dari asas akuntabilitas?”

## 2. Pembahasan

### 2.1. Dasar Hukum Lelang

Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, konsekuensi dari aturan konstitusional tersebut adalah segala pelaksanaan yang diselenggarakan oleh negara harus dilandaskan atas hukum. Berkaitan dengan pelaksanaan lelang, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dilaksanakannya proses lelang. Adapun beberapa aturan tersebut, antara lain :

---

<sup>5</sup> Mengetahui Jenis Investasi Obligasi dan Manfaatnya di Usia Muda, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengetahui-jenis-investasi-obligasi-dan-manfaatnya-di-usia-muda>, diakses 13 Agustus 2022.

<sup>6</sup> Surat Utang Negara, [https://id.wikipedia.org/wiki/Surat\\_Utang\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Utang_Negara), diakses 14 Agustus 2022.

- 1) *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad* nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *Staatsblaad* nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang;
- 2) *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.

## 2.2 Surat Utang Negara Sebagai Objek Lelang

Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2022. Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (*open auction*), menggunakan metode harga beragam (*multi price*). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (*competitive bids*) akan membayar sesuai dengan *yield* yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (*non-competitive bids*) akan membayar sesuai dengan *yield* rata-rata tertimbang (*weighted average yield*) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (*bids*) dalam lelang.

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rencana Lelang Surat Utang Negara Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Agustus 2022, <https://www.djppr.kemenu.go.id/page/load/3497/keterangan-pers-rencana-lelang-surat-utang-negara-pada-hari-selasa-tanggal-16-agustus-2022>, diakses 14 Agustus 2022.

Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019 dan PMK No. 38/PMK.02/2020.<sup>8</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik, pada bagian konsideran Menimbang poin (a) menyatakan bahwa penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana domestik dengan cara lelang merupakan salah satu alternatif bagi Pemerintah dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang strategis bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tingkat bunga terbaik dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Artinya, bahwa pemerintah dalam melaksanakan penjualan Surat Utang Negara secara lelang menurut peraturan tersebut, memberikan jaminan keamanan dan tanggung jawab atas objek lelang terhadap para pemenang lelang.

Berkaitan dengan objeknya, Pasal 1 angka 1 Permenkeu No. 168/PMK.08/2019 menjelaskan bahwa "Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Ketentuan mengenai Lelang SUN, yaitu bahwa setiap pihak dapat membeli SUN di Pasar Perdana Domestik dengan cara lelang, Pembelian SUN di Pasar Perdana Domestik dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan/atau dalam valuta asing, Pembelian SUN oleh Pihak selain Bank Indonesia dan LPS dilakukan melalui Dealer Utama, dan Pembelian SUN oleh Bank Indonesia dan LPS dilakukan secara langsung tanpa melalui Dealer Utama. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Lelang SUN termasuk Lelang SUN Tambahan, mengikuti aturan/keputusan yang berlaku di Agen Lelang. Teknis pelaksanaan Setelmen SUN aturan/keputusan yang berlaku di Bank Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Lelang SUN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan dasar hukum penerbitan Surat Utang Negara, didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, memberikan jaminan kepastian bahwa:

- 1) Penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuan tertentu;
- 2) Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok SUN yang jatuh tempo;
- 3) Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh persetujuan DPR dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia;
- 4) Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang;
- 5) Memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap penerbitan oleh pihak yang tidak berwenang dan atau pemalsuan SUN.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Abstrak Peraturan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.08/2019 Tanggal 5 November 2019 (BN Tahun 2019 No. 1432) Tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik, <https://jdih.kemenkeu.go.id/Abtrak/2019/168~PMK.08~2019Per.pdf>, diakses 14 Agustus 2022.

Adapun tujuan dari penerbitan Surat Utang Negara adalah untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek dan mengelola portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan SUN setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Atas penerbitan tersebut, Pemerintah berkewajiban membayar bunga dan pokok pada saat jatuh tempo. Dana untuk pembayaran bunga dan pokok SUN disediakan di dalam APBN.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan bentuknya, Surat Utang Negara diterbitkan dalam dua bentuk, antara lain sebagai berikut :

- 1) Surat Utang Negara (SUN) diterbitkan dalam bentuk warkat. Adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah seartifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemiliknya sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah.<sup>11</sup>
- 2) Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan tanpa warkat. Surat Utang Negara (SUN) tanpa warkat atau *Scriptless* adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*bookentry system*). Bukti kepemilikan SUN tanpa warkat yang otentik dan sah adalah pencatatan secara elektronik. Cara pencatatan transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

### 2.3 Asas Akuntabilitas Terhadap Surat Utang Negara

Surat Utang Negara yang menjadi objek lelang secara yuridis telah memberikan jaminan kepastian hukum serta keamanan atas objek yang dilelang tersebut, meskipun secara yuridis memberikan perlindungan terhadap objek lelang, dalam pelaksanaannya wajib ditegakkan untuk dapat memberikan garansi terhadap objek Surat Utang Negara yang dijual secara lelang. Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.<sup>12</sup> Dalam pelaksanaan lelang Surat Utang Negara, diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Permenkeu Nomor 168/PMK.08/2019.

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Mengenal Surat Utang Negara, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/6Publikasi/5Brosur/Mengenal%20SUN.pdf>, diakses 14 Agustus 2022.

<sup>11</sup> M. Irsan Nasarudin, SH, Indra Surya, SH., LL.M. Aspek-Aspek hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004. h. 182-183.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Sinar Grafika, 2016, hlm. 26.

Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan dan hasilnya harus dituangkan dalam risalah lelang oleh pejabat lelang sebagai bukti pelaksanaan lelang. Artinya, pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Pejabat Lelang harus bersifat imparisial yaitu tidak boleh memihak.<sup>13</sup> Dalam konteks lelang Surat Utang Negara, pihak Bank Indonesia diangkat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan lelang terhadap Surat Utang Negara. Bank Indonesia juga tidak boleh memihak, dalam arti harus netral terhadap semua peserta lelang, tidak membedakan peserta lelang dari kelas sosial tertentu dan/atau latar belakang tertentu.

Pentingnya asas akuntabilitas terhadap objek lelang Surat Utang Negara tidak hanya sebatas teori semata, namun lebih penting pada citra Pemerintah dalam pandangan masyarakat. Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan lelang secara yuridis dibebankan tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta keamanan terhadap objek lelang Surat Utang Negara. Adapun urgensi akuntabilitas terhadap Surat Utang Negara harus dijaga, mengingat Surat Utang Negara adalah bagian dari harta kekayaan, yang mana harta kekayaan terdapat potensi risiko di dalamnya, dapat berpotensi merugikan dan/atau menguntungkan pihak-pihak yang menguasai objek tersebut.

### 3. KESIMPULAN

Pelaksanaan lelang Surat Utang Negara dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lelang Surat Utang Negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, bersifat terbuka (*open auction*), menggunakan metode harga beragam (*multi price*). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (*non-competitive bids*) akan membayar sesuai dengan *yield* rata-rata tertimbang (*weighted average yield*) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan.

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (*bids*) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019 dan PMK No. 38/PMK.02/2020. Dalam penerapan asas akuntabilitas, pemerintah harus memberikan jaminan kepastian dan keamanan terhadap objek lelang Surat Utang Negara, baik secara yuridis

---

<sup>13</sup> Adwin Tista, Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia, *AI' Adl*, Volume V, Nomor 10, Juli-Desember 2013, hlm. 51.

maupun ekonomis. Mengingat bahwa Surat Utang Negara adalah bagian dari harta kekayaan, yang mana harta kekayaan terdapat potensi risiko di dalamnya, dapat berpotensi merugikan dan/atau menguntungkan pihak-pihak yang menguasai objek tersebut.

#### DAFTAR REFERENSI

- Abstrak Peraturan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.08/2019 Tanggal 5 November 2019 (BN Tahun 2019 No. 1432) Tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik, <https://jdih.kemenkeu.go.id/Abtrak/2019/168~PMK.08~2019Per.pdf>, diakses 14 Agustus 2022.
- Adwin Tista, Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia, AI' Adl, Volume V, Nomor 10, Juli-Desember 2013.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dikutip Yoga Sukmana, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2022/03/29/161352726/lelang-surat-utang-negara-pemerintah-hanya-kantongi-rp-17-triliun>, diakses 11 Agustus 2022.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Mengenal Surat Utang Negara, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/6Publikasi/5Brosur/Mengenal%20SUN.pdf>, diakses 14 Agustus 2022.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Rencana Lelang Surat Utang Negara Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Agustus 2022, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/3497/keterangan-pers-rencana-lelang-surat-utang-negara-pada-hari-selasa-tanggal-16-agustus-2022>, diakses 14 Agustus 2022.
- Investasi, Surat Utang Negara, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/67>, diakses 11 Agustus 2022.
- Maesaroh, Terbatas, Minat Asing di Lelang Surat Utang Negara RI, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220621150032-17-348973/terbatas-minat-asing-di-lelang-surat-utang-negara-ri>, diakses 14 Agustus 2022.
- Mengenal Jenis Investasi Obligasi dan Manfaatnya di Usia Muda, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-jenis-investasi-obligasi-dan-manfaatnya-di-usia-muda>, diakses 13 Agustus 2022.
- M. Irsan Nasarudin, SH, Indra Surya, SH., LL.M. Aspek-Aspek hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004.
- Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Sinar Grafika. Surat Utang Negara, [https://id.wikipedia.org/wiki/Surat\\_Utang\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Utang_Negara), diakses 14 Agustus 2022